

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

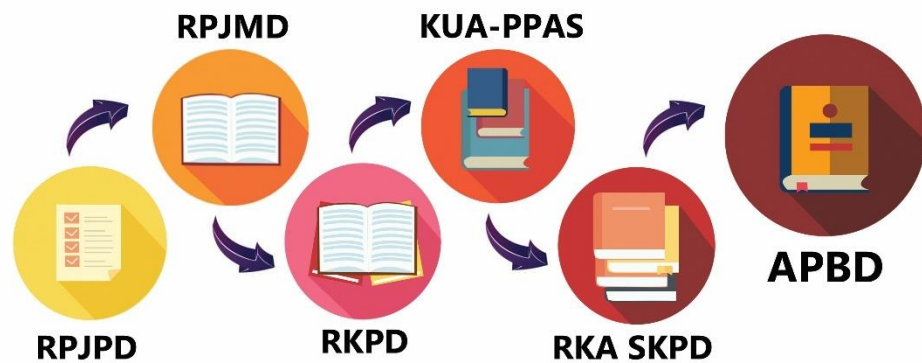
Menurut (Mardiasmo, 2018: 18) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik.

Akuntansi sektor publik dideskripsikan sebagai akuntansi dana publik yang peruntukannya untuk penyelenggaraan dana publik. Dana publik diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan oleh perorangan. Dana ini disebut APBD yang kemudian diatur dan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik dalam hal ini adalah organisasi pemerintah daerah.

2. Anggaran Sektor Publik

Komponen kunci dari perencanaan adalah penganggaran yang merupakan rencana keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan masa yang akan datang. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian penilaian kinerja (Halim dan Kusufi, 2016:48).

Gambar berikut merupakan proses alur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah:



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

Sumber: jdih.kemenkeu.go.id

Berdasarkan gambar tersebut terdapat 6 dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yaitu:

- a. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) merupakan rencana jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun.
- b. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan rencana jangka menengah daerah untuk periode 5 tahun.
- c. RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah.
- d. KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) merupakan kebijakan umum yang dijadikan landasan penyusunan APBD, kebijakan umum ini dibuat melalui

pembahasan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- e. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendapatan dan belanja tahunan yang biasanya dimuat dalam Rencana Kerja (RENJA)
- f. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

3. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Terdapat beberapa jenis anggaran sektor publik menurut Mahmudi (2019:69), antara lain:

- a. *Line Item Budget*

Sistem anggaran ini menyajikan berdasarkan sumber daya atau *input* yang digunakan, tetapi tidak mengukur efektivitas dan efisiensi program karena tidak dilakukan pengkaitan antara *output* dan *input*.

b. *Incremental Budget*

Sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun depan. Dalam praktiknya *Incremental Budget* diiringi dengan *Line Item Budget*

c. *Planning, Programing, Budgeting System (PPBS)*

Planning, Programing, Budgeting System (PPBS) adalah sistem penganggaran yang Menyusun anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi dan misi serta tujuan dan strategi organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) unit kerja.

d. *Zero Based Budget (ZBB)*

Sistem penganggaran yang mulai dari nol atau berbasis nol. *Zero Based Budget (ZBB)* menjadikan setiap periode anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol.

e. *Performance Budget*

Sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara *input* (anggaran), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang diharapkan dari program dan kegiatan termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran hasil tersebut.

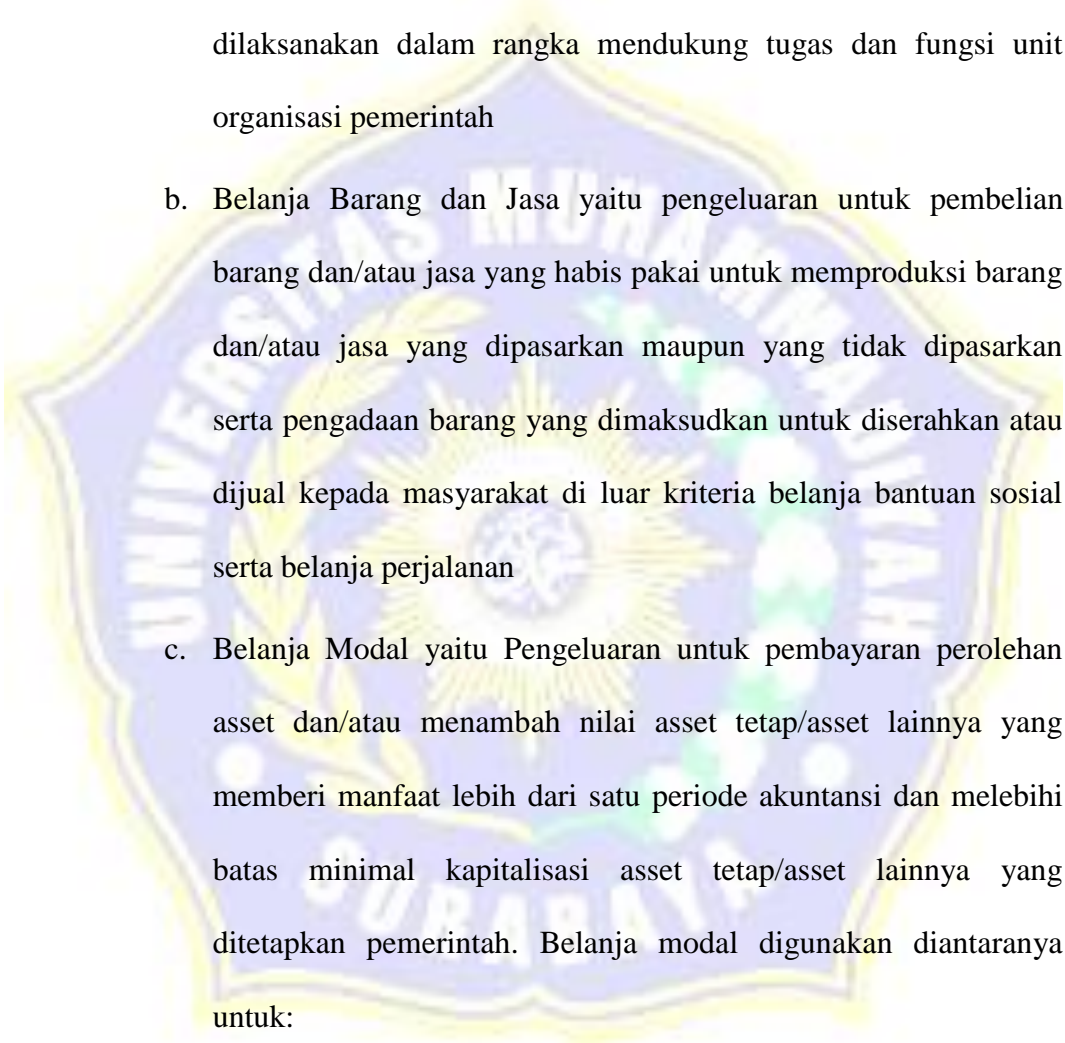
4. Belanja Daerah dalam APBD

Menurut Permendagri 77 Tahun 2020 Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut (Mahmudi, 2019:153), belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Seluruh belanja daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dilaksanakan dalam satu periode akan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menyajikan rincian realisasi masing-masing pos belanjanya serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5. Jenis-Jenis Belanja

Klasifikasi jenis belanja penyelenggaraan pemerintah menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, digolongkan menjadi:

- 
- a. Belanja Pegawai yaitu kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan
- c. Belanja Modal yaitu Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal digunakan diantaranya untuk:
- Belanja Modal Tanah adalah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran

lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan

dan jembatan, irigasi dan jaringan

- Belanja Modal Lainnya adalah belanja yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tersebut diatas

- Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) adalah Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

d. Belanja Bunga Utang yaitu Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang

e. Belanja Subsidi yaitu Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

f. Belanja Hibah yaitu belanja pemerintah pusat dalam bentuk

transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto Belanja Hibah diberikan kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) untuk memfasilitasi kegiatan KONI selama 1 tahun.

- g. Belanja Bantuan Sosial yaitu Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- h. Belanja Lain-Lain yaitu Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
- i. Belanja Transfer ke Daerah yaitu Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu jenis Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintahan sebagai

entitas akuntansi. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2, LRA dapat disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau maksimal enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

7. Pengukuran Kinerja

Kata “Kinerja” dikenal sebagai tingkat pencapaian/pelaksanaan atas suatu kegiatan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Menurut Mahsun (2016:25) Kinerja hanya bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut memiliki kriteria keberhasilan yang telah

ditetapkan.

Menurut Peraturan Daerah No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perda Kota Mojokerto, Kinerja keuangan adalah suatu analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (standar akuntansi keuangan) atau GAAP (*generally accepted accounting principle*) dan lainnya.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja keuangan di sektor publik menurut Mahmudi (2015:14) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian organisasi
- b. Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

8. Analisis Kinerja Belanja

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur Kinerja Belanja antara lain:

- a. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians disebut juga analisis selisih merupakan analisis yang menghitung selisih antara Anggaran dan Realisasinya, menurut (Mahmudi, 2019:155), analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara anggaran dengan realisasi belanja. Melalui Laporan Realiasi Anggaran yang disajikan, pengguna laporan dapat mengetahui secara langsung nilai varians antara anggaran belanja dan realisasinya.

Analisis Varians dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja = Realisasi belanja – Anggaran Belanja

Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (Mahmudi, 2019:155).

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, oleh karena itu analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (Mahmudi 2019:158).

Pada anggaran berbasis kinerja yang mana setiap anggaran

harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkatkan anggaran tidak perlu lagi terjadi (Mahmudi, 2019:160). Sehingga dapat diketahui bahwa pada anggaran berbasis kinerja, rasional atau tidaknya realisasi anggaran harus dikaitkan dengan realisasi kinerja entitas publik tersebut.

Analisis Pertumbuhan Belanja dirumuskan sebagai berikut:

Pertumbuhan Belanja Tahun t =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - \text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun t} - 1} \times 100\%$$

c. Analisis Keceragaman Belanja

Menurut Mahmudi (2019:160), Rasio keceragaman menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modalnya secara optimal.

Analisis Keceragaman Belanja dirumuskan sebagai berikut:

- Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen (Mahmudi, 2019:162)

- Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2019:163)

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi, 2019:164).

Rasio Efisiensi Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

e. Rasio Belanja terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah (Mahmudi, 2019:164). Maka rasio ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Belanja terhadap PDRB =

$$\frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2019:164) Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Berdasarkan kalimat tersebut dapat diketahui bahwa dilakukannya analisis Rasio Belanja terhadap PDRB ini untuk mengetahui Produktivitas dan Efektivitas, namun pada penelitian ini data yang digunakan adalah data belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari Belanja Daerah, sehingga efektivitasnya tidak dapat dibandingkan, maka tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui nilai produktivitas atas Belanja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto efeknya terhadap PDRB Kota Mojokerto.

B. Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terletak pada perbedaan letak kota dan provinsi serta jenis instansi pemerintahan yang diteliti yaitu salah satunya penelitian terdahulu meneliti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengampu pelayanan dasar, namun SKPD yang akan diteliti peneliti merupakan SKPD bukan pelayanan dasar, dan juga mempertimbangkan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan salah satu SKPD di Kota Mojokerto yang melaksanakan program prioritas Walikota berupa program-program dalam urusan Pariwisata, selain itu terdapat 1 alat analisis pembeda yang digunakan peneliti yaitu Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB.

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti:



Tabel 1-1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sakina Nusarifa Tantri, Dan Putri Irmawati, 2018, Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016	Bagaimana kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 – 2016	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan (1) hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik; (2) analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa dinas sudah melakukan harmonisasi belanja daerah; (3) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa

				<p>Yogyakarta sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran tidak melebihi realisasinya.</p> <p>Namun, terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien dan untuk hasil perhitungan dari rasio efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dalam menggunakan anggaran belanja tidak langsung.</p> <p>Secara keseluruhan, kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah</p>
--	--	--	--	---

				istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik.
2	Warti Ratnasari, dan Siti Munawaroh, 2019, Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau	Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Berau	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis yang telah dilakukan yaitu menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, karena kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Sosial Kabupaten Berau menurun pada Tahun 2017, dibuktikan dari: 1). Tahun 2017 jumlah anggaran belanja (Rp10.830.810.200) dan realisasi belanja (Rp 9.770.219.869) menurun pada Tahun 2016 dengan

				<p>anggaran belanja Rp14.879.889.739 dan realisasinya Rp12.558.626.940.</p> <p>2). Varians belanja pada Tahun 2017 (9,79%) lebih rendah dari Tahun 2016 (15,60%). 3). Rasio pertumbuhan belanja pada Tahun 2017 turun sebesar 22,20%.</p>
3	<p>Indah Syamsuddin, Putri Nurjannah Muhammad, dan Abdul Karim, 2022, Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat</p>	<p>Bagaimana realisasi anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja telah dilaksanakan dengan baik, pertumbuhan belanja positif dan efisien, namun dalam hal keserasian belanja, Komisi</p>

	Tahun 2018-2020	Bagaimana kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat		Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu meningkatkan belanja modal.
4	Rachmad Chartady, Vanisa Meifari, Tiara Wulandari, Ranti Utami, 2022, Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Bagaimana kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	Deskriptif Kuantitatif	Hasil analisis yang telah dilakukan yaitu menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, karena kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang menurun pada Tahun 2020, dibuktikan dari: 1).

				<p>Tahun 2020 jumlah anggaran belanja (Rp. 19.215.590.000) dan realisasi belanja (Rp 16.318.665.883) menurun pada Tahun 2019 dengan anggaran belanja Rp. 21.212.742.000 dan realisasinya Rp. 19.915.558.784. 2). Varians belanja pada Tahun 2020 (15,08%) lebih tinggi dari Tahun 2016 (6,12%). 3). Rasio pertumbuhan belanja pada Tahun 2020 turun sebesar 18,06%.</p>
5	Siti Amelia, 2022, Analisis Kinerja	Bagaimana kinerja belanja	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

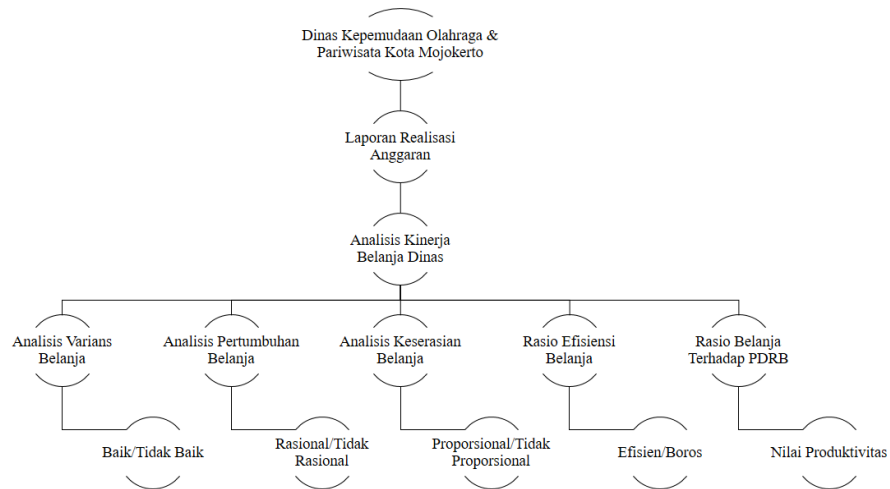
Belanja Daerah	daerah dalam	kinerja belanja
Dalam	Laporan	daerah untuk
Laporan Realisasi	Realisasi	Pemerintah
Anggaran (LRA)	Anggaran pada	Kabupaten
Badan Pengelola	BPKAD	Sukabumi dikatakan
Keuangan Dan	Kabupaten	baik karena dari
Aset Daerah	Sukabumi jika	tahun 2018 sampai
Kabupaten	dilihat	dengan tahun 2020
Sukabumi	menggunakan	untuk realisasi
	analisis varians	belanja tidak ada
	belanja,	yang melebihi dari
	analisis	yang dianggarkan
	pertumbuhan	serta perolehan rasio
	belanja,	yang baik.
	analisis	
	keserasian	
	belanja dan	
	rasio efisiensi	
	belanja.	

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Landasan Teori serta referensi dari Peneliti terdahulu maka dapat secara umum kerangka

konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas



Gambar 1.2 Kerangka Konsep

Sumber : Diolah Peneliti

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto sebagai

Organisasi Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang kemudian dapat dilakukan proses penilaian Kinerja Belanja Daerah melalui analisis-analisis yaitu Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja serta Rasio Efisiensi Belanja dengan tujuan mengetahui bagaimana kinerja belanja pada LRA dalam periode anggarannya.